

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Arman, Ys. Chaniago. 2002. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bakry, N. MS. (1991). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Danial, E. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Darmodihardjo, D (1985). *Santiaji Pancasila suatu tinjauan filosofis historis dan yuridis konstitusional*, Jakarta :KurniaEsa
- Efriza, 2012. *Political Explore: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta, cv
- Firmansyah. (2010). *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira, R. (1999). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Komalasari, K. dan Syaifullah. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, perkembangan dan Masalah Kontemporer*. Bandung: Laboratorium Pkn UPI.
- Maran, R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Moleong, J, Lexy. (2010). *Metoda Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Moleong, J. X. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2002). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. (1991). *Metodelogi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Putra, F.P., A.A. Gde. (2009). *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung Belajar dari Konflik Pilkada Langsung Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng*. Yogyakarta : Gava Media
- Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia
- Rush, M. & Althoff, P. (1971). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Penerbit IKIP
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Daerah: Universitas Michigan : Kata Hasta*
- Sekretariat Jendral KPU. 2013. *Modul: Pemilihan Kepala Daerah*. Majalengka: KPU.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno .2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Swantoro, F.S. (1997). *Kampanye dan Profil Pemilu 1997*. Analisis CSIS Tahun XXVI, No. 2 Tahun 1997.
- Wuryan, S. dan Syaifullah.(2008). *Ilmu Kewarganegaraan (civics)*. Bandung: Laboratorium Pkn UPI.

2. SKRIPSI ATAU JURNAL DAN LAIN-LAIN

- Purmana, Y.S. (2010). “*Pemilukada dan Problema Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”. *Jurnal Penelitian Politik*. 7, (1), 133-139
- Yanuarti, S. (2009). “*Golput dan Pemilu di Indonesia*” *Jurnal Penelitian Politik*. 6, (1) 21-32

Pemerintah Kabupaten Majalengka (Buku Panduan)

BPS Kabupaten Majalengka Estimasi Penduduk 2014

3. PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Jendral MPR RI. (2007). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. (2011) *Naskah Resmi UUD 1945 (Amandemen Lengkap)*, . Sleman : Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Undang-Undang Republik Indonesianomor 10 Tahun 2008tentangpemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyatdaerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang